

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

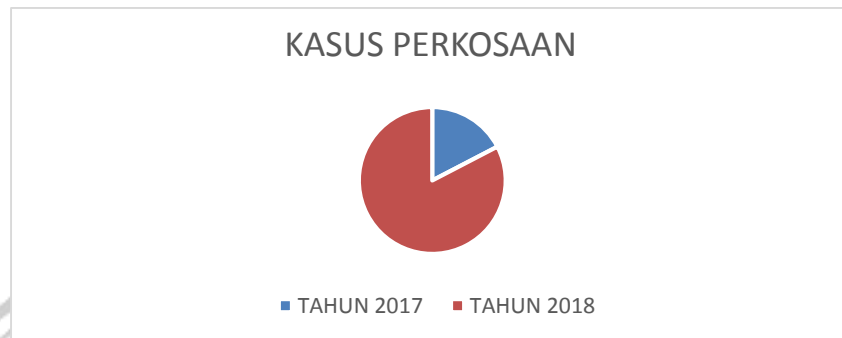
Kasus tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat yang dialami perempuan, remaja dan anak-anak. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara yakni diancam, dirayu, dipaksa, dibunuh, di tipu muslihat dan di beri obat bius dan sebagainya.<sup>1</sup> Kasus Pemerkosaan dalam perseptif hukum merupakan Tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana dalam Bab XIV Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 25 pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pada Kasus pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perkosaan secara definisi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosa adalah subyek yang di perkosa dan pemerkosaan adalah perbuatan pelaku , dengan cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiwik. 2013. *Perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam jurnal DIH*. Jurnal ilmu hukum vol.09 no 18, hal 93. diakses pada rabu 24 desember 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Ebta. *Definisi pemerkosaan*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada hari rabu 25 desember 2019 pukul 08.00 WIB



Pada Jumlah kasus pemerkosaan setiap tahun meningkat data dari komnas perempuan pada tahun 2018 tercatat 818 kasus pemerkosaan kemudian pencabulan sebanyak 321 kasus total kasus berjumlah 1.071 kasus, di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 172 kasus pemerkosaan di tahun 2017.<sup>3</sup> Kasus tindak pidana perkosaan pada umumnya korban sering kali tidak di berikan rasa keadilan terhadap korban kejahatan pemerkosaan (*victim crime*) sebab yang dialami oleh korban merupakan penderitaan yang sangat fatal yang mengakibatkan kerugian, penderitaan secara fisik, mental dan perampasan kebebasan lainnya yang jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depannya<sup>4</sup>.

Secara *De facto*, pelaku kejahatan pemerkosaan sering kali tidak di jatuhkan hukuman yang maksimal sebagaimana hukum positif yang berlaku pada saat ini dan bahkan pelaku kejahatan pemerkosaan di bebaskan dari jeratan hukum sebagaimana kasus yang menimpa korban pemerkosaan inisial S yang

<sup>3</sup> Azizah. 2018. *Komnas perempuan laporan kekerasan seksual meningkat di 2018*. <https://news.detik.com>. diakses pada rabu 25 desember 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> Juniarto. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia* Dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. Iv/No. 4/Juni/2015 hal 123. diakses pada rabu 25 desember 2019 pukul 10.00 WIB

di perkosa oleh 7 ( tujuh orang) yang terjadi di daerah Marabahan Kabupaten Batola.

Berdasarkan kronologi kasus pada bulan 18 juli tahun 2016 pada pukul 23.00wita bertempat kediaman korban S di kecamatan marabahan kabupaten batola telah terjadi perkosaan terhadap korban S yang bermula korban S di kunjungi oleh 2 orang yakni inisial ES dan SH kemudian memasuki rumah korban S dengan mengancam kepada korban S untuk melayani kebutuhan biologisnya dan tak segan segan akan membantai seluruh keluarganya bahkan 2 orang tersebut meminta sejumlah uang kepada korban S. Dalam hal ini membuat korban S ketakutan dan trauma akan diancam oleh 2 orang tersebut sehingga korban S rela untuk melakukan perbuatan yang di kehendaki oleh 2 orang tersebut, setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian 5 orang dengan inisial SS,MJ,JNI,ASN dan AD. Ke 5 orang tersebut telah melakukan hal yang sama yang dilakukan k 2 orang sebelumnya dan bahkan mengancam anaknya korban jika tidak mau diam.

Dalam hal ini korban S mengalami kesakitan dan merasakan lemas yang di lakukan oleh 7 orang pelaku pemerkosaan tersebut. Kejadian ini tidak hanya sekali saja bahkan di lakukan 6 kali perbuatan yang sama dengan pelaku yang berbeda beda sekitar bulan juli sampai dengan bulan september. Kemudian teman yang menjadi kesaksian korban S yang berinisial SW mencurigai Korban S sebab Korban S mengalami kesakitan di bagian perut sehingga korban S menceritakan kejadiannya pada temannya yang berinisial SW, kemudian saksi dan korban bersama – sama melaporkan kejadian tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Sebagaimana kronologi singkat pada kasus pemerkosaan 7 orang yang terbagi terdiri dari 3 orang dan 4 orang dalam berkas yang terpisah yang dialami korban S dalam penyelesaian di Pengadilan Negeri Marabahan. bahwa ketujuh pelaku masing – masing diancam pidana selama 7 ( tujuh tahun) penjara karena terbukti bersalah secara bersama – sama melakukan pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal.285 jo Pasl.55 ayat (1) ke-1 Psal.64 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri marabahan berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap korban inisial S yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2016.

Namun pada putusan tingkat pertama di pengadilan negeri marabahan pelaku melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi banjarmasin yang kemudian alhasil dalam penyelesaian kasus kejahatan perkosaan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan membebaskan 7 orang pelaku kejahatan pemerkosaan. Alasan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat pertama pengadilan negeri marabahan dalam amarnya :

Menyatakan Terdakwa ASN, JNI dan AD terbukti Secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan bersama – sama melakukan perkosaan yang di lakukan secara berlanjut dan menjatuhkan dengan pidana penjara masing masing selama 7 tahun.

Dalam hal alasan menjatuhkan putusan pada tingkat banding di pengadilan tingkat tinggi Banjarmasin dalam amarnya :

Menyatakan bahwa terdakwa ASN, JNI dan AD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum.

Dalam Putusan ini dari sudut pandang penulis merupakan putusan yang sangat tidak memberikan suatu Keadilan dan kemanfaatan terhadap korban S dan sebuah bukti nyata minimnya suatu perlindungan hukum terhadap korban S Sebagaimana diatur Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi tumpuan bagi pencari keadilan ternyata serta merta untuk menyalakan korban, memojokkan korban bahkan mempermalukan korban. Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi yang sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RSAS, seharusnya secara *de jure* majelis hakim mempertimbangkan surat keterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut yang masuk dalam kategori sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal.184 ayat (1) jo Pasal.187 huruf c KUHP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat keterangan trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, bukan justru menghubungkan hal- hal yang tidak relevan bagi pembuktian<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Didit. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. dalam jurnal *Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012* diakses pada rabu 25 desember 2019 pukul 10.00 WIB

Dengan penjelasan uraian singkat pada kasus pemerkosaan pada point inti dari putusan tingkat banding tersebut, Maka demikian Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi : **“ANALISA YURIDIS NORMATIF PUTASAN HAKIM NOMOR 42/PID/2017/PTBJM DI TINJAU DARI SEGI KEADILAN DAN KEMANFAATAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku kejahatan pemerkosaan dalam putusan tingkat banding Nomor42/Pid/2017/PtBjm?
2. Bagaimana putusan tingkat banding dalam perkara nomor: 42 Pid/2017/ PtBjm di tinjau dari asas keadilan dan kemanfaatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami apa pertimbangan Hakim memberikan putusan bebas pada pelaku kejahatan pemerkosaan dalam putusan tingkat banding Nomor42/Pid/2017/PtBjm.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana putusan tingkat banding dalam perkara nomor: 42 Pid/2017/ PtBjm di tinjau dari asas keadilan dan kemanfaatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendoman baru dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana yang terkait permasalahan yang di teliti oleh penulis, serta sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan s1 di bidang Ilmu Hukum.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta propaganda yang konkrit atas permasalahan yang diangkat bagi penulis, sehingga masyarakat mampu memahami persoalan tentang kasus pemerkosaan dan hak normatif terhadap korban perkosaan

##### **3. Bagi Aparat Penegakan Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang di cita citakan sesuai *Ius Konstitutum* dan *Ius Konstitudem* bagi aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian, jaksa dan hakim yang berwenang agar dapat menjalankan tugas fungsi sesuai dengan amanah negara agar mendapat tanggung jawab serta memperhatikan hak normatif korban kejahatan perkosaan dan memberi efek jera secara maksimal terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan.

#### **4. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan Mentransformasikan ilmu pengetahuan secara amaliah dan Ilmu ilmiah mengenai objek study yang diangkat, sehingga indikator jika pendek maupun jika panjang mahasiswa khususnya, dapat inisiatif dalam regenerasi calon penegak hukum ditengah masyarakat yang di cita citakan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>7</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing. hal. 295



peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (statute approach), analisis putusan hakim tingkat banding dan pendekatan analisis konsep hukum.<sup>9</sup>

## **3. Jenis bahan hukum**

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Putusan Tingkat banding Nomor 42/Pid/2017/Ptbjm.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Undang – undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- 2) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Buku – buku ilmiah dibidang hukum
- 4) Jurnal hukum

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. hal 13-14

<sup>9</sup> Amiruddin, S. M. 2014. *Pengantar metode penelitian hukum*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

5) Artikel hukum

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs Internet yang berkaitan dengan perkara ini

**4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Analisis normatif juga mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum.

**5. Teknik analisis bahan hukum**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas- asas, norma norma , doktrin dan pasal – pasal dalam undang – undang, data yang dianalisis secara kualitatif tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data . selanjutnya semua data di seleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukum atau teorinya

dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang dimaksud.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika Penulisan Hukum ini, Penulis akan menyajikan empat bab dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulis ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan dari awal yang memuat hal –hal yang menjelaskan latar belakang permasalahan pokok yang terjadi di tengah masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif dan berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan hasil dari uraian kajian teori atau landasan teori hukum, doktrin hukum dan asas- asas hukum yang berkaitan dengan judul penulis yang akan di teliti.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian hukum dan Pembahasan Pokok Atas Permasalahan Yang Ada Dalam Penulis Terkait Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Studi Putusan Nomor 42/Pid/2017/Ptbjm”.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian hukum yang sebagaimana yang berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi hasil dari penelitian yang di paparkan oleh penulis yang menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Studi Putusan Nomor 42/Pid/2017/Ptbjm”.

